

Pendidikan Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

Muhammad Kosim
m.kosim@gmail.com
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrack: Setiap manusia dilahirkan memiliki *fitrah*, agar manusia tetap berada pada fitrahnya dan potensi dasarnya yang suci berkembang optimal, maka dibutuhkan *tarbiyah wa ta'lim* atau proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan Islam. Ada lima nilai utama karakter yang menjadi sentral Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk diterapkan dan dikembangkan di sekolah, yaitu karakter religius, nasionalis, integritas, gotong-royong, dan mandiri. Pendidikan karakter harus dibangun di atas landasan keislaman dan keindonesiaan, secara total taat pada ajaran Islam dan berpihak pada bangsa Indonesia. Pendidikan karakter berbasis keislaman dilakukan secara optimal, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Mengoptimalkan pendidikan empat pilar kebangsaan dan menguatkan ruhaniah guru efektif di samping loyalitasnya pada NKRI, merupakan bentuk pendidikan karakter berbasis keindonesiaan dan keislaman.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

A. Pendahuluan

Idealnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dihuni mayoritas penduduk muslim ini menjadi bangsa yang maju dan menjadi teladan bagi negara lain. Sebab negara ini dilengkapi dengan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang beragam. Bukankah Islam mendorong umatnya menjadi cerdas dan gemar menyelamatkan serta ditakdirkan sebagai *khairu ummah*?

Umat Islam Indonesia dihadapkan pada dua persoalan: internal dan eksternal. Umat Islam yang mayoritas belum memiliki satu pandangan tentang hubungan Islam dan negara. Komitmen umat Islam menjalankan agamanya dalam setiap tindakan pun masih dipertanyakan. Di sisi lain, umat Islam juga dihadapkan pada persoalan eksternal. Sebut saja

perkembangan media yang *phobia* akan kebangkitan umat Islam, cenderung memojokkan umat Islam dengan berbagai streotipe negatif, seperti intoleran, radikal, hingga mengancam keberadaan NKRI. Padahal fakta sejarah membuktikan umat Islam mendominasi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Ironisnya, bangsa ini diliputi oleh sejumlah masalah. Masalah yang paling krusial adalah persoalan karakter. Sebut saja korupsi, manipulasi hukum, gaya hidup materialisme, sekularisme dan hedonisme, hingga upaya diskriminasi terhadap tokoh agama. Akhlak yang buruk akan membuat manusia jauh dari ajaran agamanya. Agama sekedar simbol. Bahkan agama hanya menjadi komoditas kepentingan pribadi dan golongan. Pada gilirannya pribadi yang

bermoral busuk itu akan mengubah kekayaan alam menjadi malapetaka sehingga kebodohan dan kemiskinan semakin langgeng dalam kehidupan umat.

Bangsa ini sudah sadar akan persoalan buruknya karakter ini. Karena itu, muncul kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi salah satu kebijakan pendidikan nasional era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), sejak tahun 2010 yang dikenal dengan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB) (Balitbang Puskur Kemdikbud, 2010). Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo tetap memberi perhatian terhadap pendidikan karakter yang menjadi bagian penting dalam Nawacita Jokowi-JK pada butir ke delapan, yaitu memperkuat pendidikan karakter bangsa, sehingga muncullah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Melalui Kemendikbud, GNRM diterapkan dalam bentuk program yang bernama “Penguatan Pendidikan Karakter”, disingkat PPK. PPK itu sendiri diterapkan melalui basis kelas, sekolah dan masyarakat.

Apakah konsep PPK yang dikembangkan saat ini mampu menjawab persoalan umat? Tampaknya konsep PPK yang ditawarkan lebih menekankan pada aspek lahiriah, belum mengakar pada esensi pendidikan itu sendiri. Menurut Kosim (2016) pendidikan karakter seharusnya dikembangkan untuk memelihara manusia tetap berada pada fitrahnya. Fitrah manusia itu cenderung dan mencintai kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Hal ini relevan dengan

konsep Ryan dan Bohlin (dalam Majid dan Andayani, 2011) yang menyebut karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Dalam pandangan Lickona (2016), karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik—kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan.

Meminjam istilah Naquib al-Attas (2011), perlu islamisasi dalam pendidikan kita, yaitu suatu proses yang lebih bersifat *evolution* pada keadaan yang asal daripada evolusi di mana manusia sebagai sebuah ruh telah sempurna, tetapi manusia ketika terjelma dalam diri jasmani akan menjadi alpa, jahil dan *zhalim* terhadap dirinya sendiri dan karenanya tidak terhindarkan lagi menjadi tidak sempurna. Inilah hakikat manusia yang dilahirkan dengan potensi fitrah. Dalam konteks pendidikan Islam, setiap manusia dilahirkan memiliki *fitrah* dan selagi manusia tetap berada pada fitrahnya ia akan menjelma menjadi manusia sempurna (*al-insan al-kamil*). Jika tidak, maka manusia akan hina sehingga martabatnya menyerupai hewan (Qs. Al-A'raf/7: 176 dan 179; al-Maidah/5: 60; al-Ankabut/29: 41; al-Jumu'ah/62: 5); atau benda mati seperti batu (al-Baqarah/2: 74). Agar manusia tetap berada pada fitrahnya dan potensi dasarnya yang suci itu berkembang optimal, dibutuhkan *tarbiyah wa ta'lim* atau proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan Islam.

Oleh karena itu, mengatasi persoalan karakter, perlu menggagas pendidikan karakter yang berbasis keislaman dan keindonesiaan. Umat Islam harus tampil terdepan menegakkan ayat-ayat Allah dengan menampilkan Islam *rahmatan lil-'alamin* serta memelihara dan merawat NKRI.

B. Konsep Dasar PPK

Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, pasal 1 menyebutkan bahwa "Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)."

Paling tidak ada lima nilai utama karakter yang menjadi sentral PPK untuk diterapkan dan dikembangkan di sekolah, yaitu karakter religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri.

a. nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup

rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

- b. nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- c. nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita, sehingga lahir etos kerja (kerja keras), tangguh, banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- d. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan sehingga lahir

- karakter menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.
- e. nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warganegara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Dengan integritas lahirlah karakter kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas) (Hendarman, 2016).

Lima karakter utama ini mengikat nilai-nilai karakter lain, seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain.

Gerakan PPK dilaksanakan dengan tiga berbasis, yaitu PPK berbasis kelas, PPK berbasis sekolah,

dan PPK berbasis masyarakat/komunitas. *Pertama*, PPK Berbasis Kelas menurut Hendarman (2016) dapat dilakukan dengan mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran serta mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kedua, PPK berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum, serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah (Hendarman, 2016). PPK berbasis budaya sekolah diterapkan dengan menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah, menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan, melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah, mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah, serta mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah (Hendarman, 2016).

Ketiga, PPK berbasis masyarakat dapat diimplementasikan dengan

memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan; melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, para ulama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM, serta mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya (Hendarman, 2016). Di antara bentuk kolaborasi sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan PPK adalah: 1) pembelajaran berbasis museum, cagar budaya dan sanggar seni, 2) *mentoring* dengan seniman dan budaya lokal, 3) kelas inspirasi, 3) program siaran radio *on-air*, 5) kolaborasi dengan media televisi, koran, dan majalah, 6) gerakan literasi, 7) gerakan digital, 8) kolaborasi dengan perguruan tinggi: riset dosen-guru, 9) program magang kerja, dan 10) kerjasama dengan komunitas keagamaan (Hendarman, 2016).

Ketiga basis tersebut mesti bersinergi sehingga konsep tripusat pendidikan dapat diterapkan secara optimal. PPK juga perlu diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan nonkurikuler secara simultan dan integral. Bahkan dalam Perpes 87/2017 (pasal 4) menjelaskan PPK diselenggarakan tidak saja di lembaga formal, tetapi juga di jalur

pendidikan informal dan nonformal.

C. Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Keislaman dan Keindonesiaan

Setidaknya ada empat alasan pentingnya penerapan pendidikan karakter berbasis keislaman dan keindonesiaan. *Pertama*, alasan dogmatis. Secara dogmatis, Islam adalah agama yang *haq* diyakini mengatur kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Islam juga menjadi rahmat bagi segenap alam (*rahmatan lil 'alamin*). Masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam dengan benar pasti berdampak positif bagi lingkungan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Alquran mengajarkan agar mereka yang beriman niscaya menebar kebaikan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (Qs. al-Anbiya'/21: 107 dan Al-A'raf/7: 56).

Kedua, alasan filosofis. Manusia adalah makhluk paling mulia dengan ragam potensi yang dimilikinya, seperti akal, kalbu dan nafsu. Potensi tersebut akan berkembang secara optimal melalui proses pendidikan. Namun, jika proses pendidikan yang dilakukan tidak seimbang dan bertentangan dengan fitrah manusia, seperti hanya menitikberatkan pada akal, maka lahirlah manusia yang pintar tanpa moral. Kepintarannyapun membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka pendidikan mesti berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah dasar manusia adalah beragama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Qs. Al-Rûm/30:30).

Oleh karena itu, setiap manusia senantiasa membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sejak masa purba hingga manusia modern, manusia tetap mengakui adanya kekuasaan yang transendental (Ramayulis, 2002).

Selain fitrah beragama, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Immanuel Kant, seperti dikutip Chairul Anwar (2014), menyatakan manusia hanya menjadi manusia jika berada di sekitar manusia. Karena itu manusia berkelompok, termasuk berkomitmen dalam suatu komunitas dengan aturan yang disepakati bersama. Di sinilah pentingnya negara yang direkat dengan semangat nasionalisme. Lalu pendiri bangsa ini sepakat mendirikan negara Indonesia. Karena itulah pendidikan karakter harus memelihara semangat kebangsaan, nasionalisme, atau keindonesiaan.

Ketiga, alasan konstitusional. Dasar dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang merajut perbedaan menjadi persatuan bangsa dengan mengakomodir kepentingan umat beragama agama dan bangsa. Agama sesungguhnya menjiwai sila lain dalam Pancasila. Perhatikanlah perisai yang tergantung di leher burung Garuda, terdapat lima gambar/symbol mewakili masing-masing lima sila. Lalu gambar sila pertama (bintang lima) diletakkan di bagian tengah sehingga bersentuhan langsung dengan empat gambar lainnya. Karena itu, Ahmad Tafsir (2010) menyebut agama merupakan *core* dari Pancasila. Menurutny,

membaca Pancasila haruslah sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan YME, 3) Persatuan Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan Ketuhanan YME, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan YME. Bila Ketuhanan YME adalah *core* Pancasila, maka seluruh turunannya (UUD, UU, PP, Permen, dan Juknis) haruslah menempatkan Ketuhanan YME sebagai basis pendidikan nasional.

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (2) ditegaskan pula bahwa "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman." Kalimat "berakar pada nilai-nilai agama" menegaskan bahwa pendidikan agama sejatinya menjadi *core* dari pendidikan nasional, di samping kebudayaan nasional sebagai kearifan bangsa yang perlu dirawat dan dilestarikan. Bahkan indikator utama tujuan Sisdiknas adalah "Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia...." Bukankah kata "Iman dan takwa serta akhlak" banyak diulang dalam Alquran? Lalu tujuan tersebut dikunci dengan kalimat "Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab", sebagai pertanda bahwa peserta didik menjadi bagian dari

warga negara yang setia terhadap NKRI. Dengan demikian, keberadaan pendidikan Islam akan memperkuat sistem pendidikan nasional. Jika pelaksanaan pendidikan Islam kurang optimal, maka tujuan pendidikan nasional akan menuai kegagalan.

Keempat, berkaca pada sejarah. Tidak diragukan lagi, umat Islam berjaya di saat penguasanya memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam. Islam menjiwai para pemimpin dalam membuat keputusan, terutama bidang pendidikan. Sebut saja khalifah Umar bin Abdul Aziz masa Umayyah Timur, kejayaan Islam di Abbasiyah era Harun ar-Rasyid dan al-Makmun, atau gemerlapnya cahaya Andalusia masa Abdurrahman dan Hakam. Di saat Islam dan negara berjalan secara harmonis lalu melandasi pengelolaan pendidikan, niscaya umat akan berjaya. Karena itu, bangsa Indonesia yang majemuk ini sejak dahulu dikenal pula sebagai bangsa yang berbudaya, santun, ramah dan punya tradisi gotong royong yang kuat, merupakan modal utama untuk menampilkan umat Islam yang berwibawa di pentas internasional.

Dengan demikian, pendidikan karakter harus dibangun di atas landasan Keislaman dan Keindonesiaan. Ketaatan pada ajaran Islam secara totalitas dan keberpihakan pada bangsa Indonesia yang didirikan atas konsensus bersama, harus menjadi bagian dari karakter setiap umat sehingga dengan penuh keyakinan mengasah diri untuk mengabdikan pada agama, berbakti pada bangsa Indonesia.

D. Penguatan Pendidikan Islam

Seperti yang disinggung sebelumnya, pendidikan karakter akan mudah terbentuk jika seseorang memiliki komitmen tinggi terhadap keyakinan dalam agamanya. Apalagi ajaran Islam yang tidak hanya mengatur urusan hamba dengan Tuhan semata, lebih dari itu Islam mengatur secara komprehensif, holistik dan universal dalam setiap kehidupan manusia.

Selama ini, sistem pendidikan nasional memang memberikan leluasa terhadap pelaksanaan pendidikan Islam, baik di lembaga formal, nonformal dan informal. Hanya saja, pelaksanaannya masih belum optimal. Karena itulah dibutuhkan penguatan pendidikan Islam. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga hal yang mendesak perlu dilakukan.

1. Penambahan dan Penguatan Pembelajaran PAI

Secara kuantitas, aset terbesar umat Islam itu berada di sekolah. Sebab minat masyarakat lebih banyak yang mengenyam pendidikan di sekolah jika dibandingkan dengan madrasah dan/atau pesantren. Karena itu, penguatan pendidikan Islam di sekolah mutlak dibutuhkan sehingga dapat menyelamatkan aset umat.

Di satu sisi, kebijakan pemerintah tentang kurikulum 2013 di sekolah, membawa angin segar terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebab, jumlah jam tatap muka telah bertambah dari 2 jam menjadi 3 jam di tingkat

SMP dan SMA/SMK, bahkan 4 jam untuk SD. Namun di sisi lain, kurikulum 2013 membatasi sekolah untuk menerapkan pembelajaran agama sesuai dengan jumlah jam tersebut. Secara teknis pembatasan itu dilakukan saat sekolah melakukan sinkronisasi data kurikulum ke Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan). Jika sekolah ingin menambah jam pelajaran PAI, secara sistem dalam Dapodik secara otomatis menolaknya (Kurikulum Mulok Pendidikan Al-Qur'an, 2010).

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pada pasal 5 dijelaskan, ayat (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan. Lalu ayat (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. Aturan ini juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah. Dijelaskan pada pasal 7 ayat (3): Sekolah dapat menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan dan/atau pendalaman materi, serta penambahan jam pelajaran sesuai kebutuhan.

Sayangnya, PP tersebut tidak memiliki turunan berupa Permendiknas atau Permendikbud. Padahal sekolah lebih "taat" pada Menteri Pendidikan dari pada Menteri Agama. Akibatnya, aturan yang telah memberi peluang lebar itu tertutup karena tidak diikuti oleh kebijakan yang lebih teknis. Jika pendidikan agama lebih diperkuat,

jelas menjadi modal utama untuk mendidik karakter peserta didik.

Dalam literatur pendidikan Islam, dikenal istilah "Tarbiyah al-ruhiyah" atau pendidikan ruhani. Secara esensial, pendidikan ruhani adalah lingkaran terdalam atau inti dari pendidikan karakter. Orang yang memiliki kesucian ruhani, pasti menampilkan perilaku yang baik.

Menurut Said Hawa (2010) ada tiga pilar pendidikan ruhani, yaitu ilmu pengetahuan, latihan-latihan ruhani, dan wirid harian. Tanpa ilmu, bagaimana mungkin seseorang bisa terbina menjadi insan yang berkarakter? Maka untuk memiliki ruhaniyah yang suci, diperlukan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat membedakan antara hak dengan batil, mana yang perintah mana pula larangan, mengetahui halal dan haram. Melalui ilmu pengetahuan, seseorang mengetahui pula bagaimana agama membimbing manusia untuk memiliki kesucian ruhani. Di sinilah letak pentingnya sekolah menjadi lembaga pendidikan yang menyajikan ilmu agama kepada setiap peserta didik.

2. *Membangun Kultur Qurani*

Alquran sejatinya menjadi landasan, pedoman dan modal dasar untuk membangun suatu peradaban yang diridhai Allah SWT. Umat Islam harus bangkit dari keterbelakangan dan perpecahan menjadi kelompok yang terhormat dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain, bahkan lebih dari itu menjadi kelompok yang unggul dalam segala hal sehingga menjadi teladan, bukan ditakuti dan dibenci.

Hanya saja, umat Islam masih mengalami persoalan untuk mengimplementasikan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat Alquran yang sarat dengan ajaran moral dan motivasi untuk menjadi umat terbaik itu masih bersifat normatif, hanya ada dalam pengetahuan umat, belum masuk ke dalam “Rongga dada” umat. Karena itu, perlu kajian serius dari para pakar atau ilmuan Islam untuk merumuskan metode yang tepat untuk menjadikan umat agar berakhlak Alquran. Seperti halnya Nabi SAW yang memiliki akhlak Alquran (*kana khuluquhu al-Quran*).

Hemat penulis, mengembalikan umat agar berakhlak Alquran efektif dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan Islam di sekolah/madrasah atau pesantren, tidak sedikit yang masih menonjolkan aspek fiqh sehingga peserta didik mengenal dan memahami Islam lebih pada persoalan halal-haram, doktrin surga-neraka, pahala-dosa.

Maka perlu melakukan penataan ulang terhadap kurikulum atau materi-materi, khususnya mata pelajaran PAI atau yang serumpun dengannya di Madrasah, dengan orientasi utama pada ayat-ayat Alquran yang mendorong pada pembentukan sikap kepribadian sebagai modal membangun bangsa yang berperadaban. Integrasi kajian Alquran terhadap materi sains dan ilmu umum juga perlu diterapkan pada peserta didik muslim sehingga tidak tercipta dikotomi ilmu.

Di sekolah, misalnya, harus dibangun kultur sekolah yang Qurani. Hal itu dapat dilakukan

dengan cara: *pertama*, melakukan integrasi ayat-ayat Alquran ke dalam mata pelajaran yang relevan (Dinas Pendidikan, 2010). Hal ini pernah dilakukan di akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an atas dukungan BJ. Habibie. Dengan upaya ini, diharapkan terbentuk paradigma interal-holistik antara sains dan Alquran, antara ilmu dan agama, sehingga terbentuk pribadi yang integritas, bukan pribadi dikotomis dan sekuler.

Kedua, gerakan tahfiz Alquran. Beberapa sekolah telah melakukan pembinaan siswa untuk menghafal Alquran. Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara hafalan Alquran dengan perilaku atau karakter peserta didik. Mereka cenderung santun dan menghormati guru-gurunya. Mereka juga biasanya menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Apalagi di kalangan para hafiz meyakini bahwa perbuatan haram bisa menghilangkan hafalan. Hubungan antara perilaku negatif dengan hafalan sangat dikenal, terutama melalui pernyataan Imam Syafi’I “*Saya mengadu kepada guruku Waqi’ tentang buruknya hafalanku, maka dia menasihati agar meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan padaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat*”.

Kompetensi dan karakter peserta didik yang memiliki hafalan Alquran juga diakui oleh beberapa perguruan tinggi. Bahkan beberapa universitas ternama memiliki kebijakan menerima mahasiswa jalur khusus (tanpa tes), termasuk di fakultas kedokteran, jika calon mahasiswa tersebut hafal beberapa

juz Alquran. Berdasarkan kenyataan itu, maka pendidikan Alquran seharusnya menjadi kebijakan nasional untuk peserta didik muslim. Apalagi dalam tradisi pendidikan Islam, kegiatan menghafal Alquran memang menjadi kegiatan inti di tingkat dasar dan menengah. Anak-anak umat Islam terlebih dahulu menghafal Alquran, lalu di usia remaja mereka mendalami filsafat, sains, dan ilmu-ilmu *kauniyah* lainnya (Hanani dan Ghazali, 2004).

Kegiatan gerakan tahfizh Alquran tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan pembiasaan yang merupakan bagian dari kultur sekolah. Dalam hal ini, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang model yang tepat untuk menerapkan tahfizh Alquran di sekolah-sekolah.

Ketiga, mendorong peserta didik untuk membaca Alquran di rumah. Dalam hal ini, perlu kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Alquran bukanlah kitab antik yang tersimpan rapi di lemari. Alquran harus dipelajari secara serius, baik di rumah maupun masyarakat (melalui majlis taklim dan sejenisnya). Selama ini ada kesan bahwa umat Islam yang peduli pada Alquran lebih mementingkan aktivitas “membaca” ayat-ayat Alquran itu sendiri, tanpa memahami makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

3. Menggiatkan *Islamic Parenting Education*

Pembentukan karakter lebih efektif dilakukan sejak dini, melalui keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dalam

keluarga terjadi penanaman nilai, pembiasaan perilaku baik, termasuk pembentukan pribadi agamais. Menurut Lickona (2014) orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral. Mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anak-anaknya.

Orang yang amat berperan dalam keluarga adalah ibu. Penyair al-Hafizh Ibrahim pernah menulis “Ibu adalah sekolah (*al-umm madrasah*), bila disiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat” (Al-Abrasyi, 2003). Hanya saja, tidak semua orang tua memiliki ilmu atau pemahaman yang baik tentang pola asuh terhadap anaknya secara ilmiah dan ilahiah. Orang tua hanya mendidik anak-anaknya secara alamiah, mewarisi tradisi orang tuanya secara turun temurun tentang cara mengasuh anak-anaknya.

Oleh karena itu, kesadaran orang tua terhadap mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dan pendekatan ilmiah harus ditingkatkan. Dalam hal ini, perlu mendesain pendidikan Islam untuk calon orang tua (pendidikan pra-nikah), orang tua yang akan memiliki anak (sudah menikah), dan orang tua yang sudah memiliki anak (terutama yang balita dan remaja). Beberapa komunitas orang tua dapat diberdayakan, seperti Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di bawah binaan BKKBN. Atau perlu menghidupkan lembaga pendidikan khusus orang tua yang lebih terstruktur dan teratur di jalur pendidikan nonformal. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis keislaman dapat dilakukan secara optimal, baik di keluarga,

masyarakat, maupun sekolah secara integral.

E. Penguatan Pendidikan Keindonesiaan

Di samping penguatan pendidikan Islam, penguatan pendidikan kebangsaan dan keindonesiaan perlu dilakukan. Sebab tidak selamanya orang yang taat menjalankan agama akan loyal pada suatu negara, apalagi jika negara tersebut diyakini bukan berdiri atas nama agama. Maka dalam konteks keindonesiaan, penting memperkuat karakter nasionalisme.

Karakter nasionalisme seharusnya menjadi sebuah gerakan nasional. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendidikan empat pilar kebangsaan yang beberapa tahun terakhir banyak disosialisasikan oleh lembaga legislatif. Jika di masa orde baru dikenal program "P4", maka di era ini perlu mendesain "Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan" yang berorientasi pada pendidikan nasionalis di sekolah dan madrasah. Empat pilar kebangsaan jangan sekedar disosialisasikan dalam bentuk ceramah, seminar, talk show atau *tour* dari kampus ke kampus, tetapi perlu didesain dalam bentuk pelatihan (*training*) untuk pelajar dan mahasiswa dengan pendekatan saintifik, rasional, pembiasaan, keteladanan serta pendekatan integral dan holistik (Kosim, 2017).

Pendidikan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik berupa penyajian materi, terutama

kegiatan praktis yang menanamkan semangat nasionalisme. Setiap peserta didik perlu memperoleh pengalaman belajar tentang empat pilar tersebut sehingga mereka memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa yang bersatu dan berdaulat dalam wilayah NKRI (MPR, 2012). Hal ini penting dilakukan untuk tegaknya bangsa yang mandiri. Apalagi di era globalisasi yang sangat kompetitif, tanpa semangat nasionalisme, bangsa ini bisa terjajah oleh hegemoni bangsa asing, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, hingga seni dan budaya.

F. Penguatan Ruhaniyah Guru

"Mungkinkah seorang murid menguasai matematika setelah belajar kepada seorang guru yang tidak pandai berhitung? Bisakah seorang siswa terampil berbahasa Inggris setelah belajar dari guru yang tidak pandai bahasa Inggris? Lalu, apakah mungkin peserta didik berkarakter setelah belajar dari guru yang kotor ruhaniyahnya?"

Logikanya sama saja, jika guru bodoh tidak bisa mencerdaskan muridnya guru yang buruk laku tidak akan sukses mendidik karakter peserta didiknya. Kecuali jika peserta didik itu belajar dari sumber lain.

Oleh karena itu, mendidik karakter peserta didik harus memperkuat ruhaniyah gurunya. Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Ia harus jadi teladan dalam menampilkan karakter positif. Karena itu, penguatan kapasitas guru tidak hanya terfokus pada kompetensi pedagogik dan

profesional semata, tetapi juga harus dilakukan penguatan kompetensi kepribadian dan sosial. Guru yang profesional dari segi metodologi dan penguasaan materi, tanpa keteladanan niscaya akan gagal menerapkan pendidikan karakter.

Dalam hal ini, setiap guru mesti memiliki karakter ulama yang memiliki kecerdasan ruhaniyah. Sebab ulama adalah pewaris para nabi, sementara kesuksesan para nabi mendidik umatnya karena keteladanan yang dimilinya. Ulama tidak saja orang yang mendalami ilmu-ilmu agama (*ulum al-syar'iyah*). Tetapi ulama adalah orang yang berilmu, beramal dengan ilmu, mengkaji alam untuk pengembangan ilmu, lalu dengan ilmu itu ia takut dan dekat dengan Yang Maha Memiliki Ilmu, serta mendidik orang lain pun menjadi ulama. Ulama selalu tunduk dan taat pada Tuhan yang menganugerahkan ilmu itu (Qs. Fathir/35: 28) (Nata, 2016).

Nabi Muhammad SAW, misalnya, adalah model akhlak yang paling ideal (Qs. Qalam/68: 4). Akhlak nabi itu sendiri terhimpun dalam satu kata, yaitu al-Qur'an. Karena Nabi memiliki akhlak yang ideal, maka salah satu misinya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dan misi itu berhasil dilakukan dengan tegaknya masyarakat madani dan perkembangan umat Islam di kemudian hari hingga saat ini. Kunci keberhasilannya dalam mendidik akhlak manusia itu adalah dengan keteladanan (Qs. al-Ahzab/33: 21). Lalu nabi mendidik dengan penuh kasih sayang (Qs. at-Taubah/9: 128), lemah lembut dan

pemaaf (Qs. Ali Imran/3: 159) serta sifat-sifat mulia lainnya.

Penguatan ruhaniyah guru efektif dilakukan dengan mempersiapkan guru yang memiliki komitmen keislaman yang tinggi, di samping loyalitasnya pada NKRI. Selama ini, ada kesan pembinaan guru lebih menitikberatkan pada kompetensi pedagogik dan profesional semata. Ke depan, perlu dirancang pendidikan dan pelatihan yang efektif untuk mengasah ruhaniyah guru sehingga menjadi figur central atau model ideal karakter bagi peserta didiknya.

G. Penutup

Gagasan pendidikan karakter berbasis keislaman dan keindonesiaan merupakan upaya untuk membangkitkan kekuatan umat Islam di negeri sendiri: Indonesia. Umat Islam harus menjadi kekuatan positif dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadaban. Karena itu, umat Islam harus keluar dari masalah internal yang meliputinya. Cara yang paling efektif adalah mempersiapkan umat yang berkarakter melalui proses pendidikan. Jika umat telah terdidik memiliki karakter positif, maka berbagai tantangan eksternal akan mudah diatasi. Sebaliknya, jika internal umat lemah, jauh dari ajaran Islam, maka umat ini akan menjadi mangsa, lalu Indonesia tinggal raga.

Sekolah-sekolah dengan guru dan siswa yang mayoritas beragama Islam perlu merancang model pendidikan berbasis Keislaman dan Keindonesiaan secara teknis sehingga mudah untuk menerapkannya. Sekolah tidak boleh abai terhadap kondisi karakter

peserta didiknya. Dibutuhkan kerjasama dan komiteman setiap guru menjadi pribadi berkarakter sehingga lahir lulusan yang berkarakter pula sesuai dengan ajaran Islam dan berkontribusi terhadap peradaban bangsa: Indonesia.

Sumber Bacaan

al-Abrasyi, Muhammad Athiyyah, 2003, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Penj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia

al-Attas, Syeh M. Naquib, *Islam dan Sekularisme*, Penj. Khalif Muammar, Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan [PIMPIN], 2011, cet. ke-2

Anwar, Chairul, 2014, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: SUKA Press

Balitbang Puskur Kemdikbud, 2010, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, Jakarta: Puskur Kemdikbud

Hanani, Silfia dan Ghazali, 2004, *Dialog Filsafat dengan Teologis; Tuhan dan Alam dalam Perbincangan Filosof Ibnu Sina dan Teolog al-Ghazali* Bandung: Humaniora

Hawwa, Sa'id, 2010, *Tarbiyatuna ar-Ruhiyah*, Penj. Imam Fajaruddin, Surakarta: Era Adicitra Intermedia

Kosim, Muhammad, 2016, *PPK Berbasis Kearifan Lokal*, Padang: Harian Padang Ekspres, 18 Oktober

“Pendidikan Agamais dan Nasionalis” dalam *Tinjauan secara Kritis Reformasi Pendidikan Nasional; 85 Tahun Tribute to Prof. H.A.R. Tilaar*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2017

Lickona, Thomas, 2012, *Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter*, Penj. Juma Abdu Wamaungo, Jakarta: Bumi Aksara

Majid, Abdul dan Dian Andayani, 2011, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nata, Abuddin, 2003, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press

_____, 2016, *Pendidikan dalam Perspektif Alquran*, Jakarta: Kencana

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Ramayulis, 2002, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia

Tafsir, Ahmad, 2010, *Filsafat Pendidikan Islam; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya